

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN DI DESA
KESAMBEN KULON KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK**

Siti Marofah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sitimarofah@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Kodrat perempuan yang menjadi ibu rumah tangga mendasari pendidikan bukan hal yang mudah untuk dicapai bagi seorang perempuan. Mahalnya biaya pendidikan dan kurangnya akses pendidikan serta persoalan budaya (patriarki) membuat perempuan di Desa Kesamben Kulon yang miskin dan marginal sulit untuk mengenyam pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan kepemimpinan perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada tiga tahap proses pemberdayaan yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui program sekolah perempuan di Desa Kesamben Kulon berjalan dengan baik dengan menggunakan proses pemberdayaan yang bertahap. Pada tahap penyadaran Sekolah Perempuan telah mampu menyadarkan perempuan pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tahap transformasi kemampuan, perempuan belajar tentang gender, kesehatan reproduksi perempuan dan kepemimpinan perempuan serta peningkatan keahlian hidup. Tahap peningkatan kemampuan yaitu meningkatkan kepemimpinan dan kapasitas diri perempuan dalam pembangunan desa melalui kegiatan pemantauan terhadap program perlindungan sosial JKN BI, pendampingan perempuan dalam forum Musrenbang sebagai advokasi perempuan dalam pembangunan desa serta peningkatan keterampilan perempuan dalam menulis di koran "Gema Perempuan Pedesaan". Sehingga peneliti memberikan saran yaitu untuk melakukan sosialisasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan semangat perempuan, mengembangkan hasil dari kegiatan pertanian organik sebagai produk lokal Desa Kesamben Kulon yang memiliki daya saing dengan produk yang beredar di pasaran dan melakukan workshop penguatan karakter perempuan di ranah publik.

Kata kunci: Sekolah, Pemberdayaan; Perempuan

Abstract

The nature of women who become housewives underlies education is not an easy thing to achieve for a woman. The high cost of education, lack access to education, and cultural issues (patriarchy) make it difficult for women in the poor and marginalized Kesamben Kulon Village to receive formal education. This study aims to describe women's empowerment through the Women's School program in Kesamben Kulon Village to increase women's participation in women's leadership development. The type of research used is descriptive qualitative, which focuses on three stages of the empowerment process: the awareness stage, the ability transformation stage, and the intellectual ability improvement stage. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis consists of data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The results showed that women's empowerment through the women's school program in Kesamben Kulon Village went well using a gradual empowerment process. At the awareness stage, Sekolah Perempuan has made women aware of the importance of gender equality and women's participation in development. In the capacity transformation stage, women learn about gender, women's reproductive health, and women leadership and improve life skills. Finally, the capacity-building stage is increasing women's leadership and self-capacity in village development through monitoring activities on the BI JKN social protection program, mentoring women in the Musrenbang forum as women's advocacy in village development and improving women's skills in writing in the newspaper "Echo of Rural Women." So the researchers give suggestions, namely to carry out continuous socialization to increase the spirit of women, develop the results of organic farming activities as local products of Kesamben Kulon

Village that have competitiveness with products circulating in the market, and conduct workshops on strengthening the character of women in the public sphere.

Keywords: School, Empowerment; Woman

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan manusia. Keterlibatan laki-laki maupun perempuan sebagai subyek pembangunan diperlukan untuk mencapai keadilan berspektif gender. Perempuan sendiri merupakan sumber daya manusia yang harus ikut serta terlibat dan ditempatkan sebagai subjek dalam sebuah pembangunan bukan hanya sebatas objek pembangunan (Sofiani, 2013:64).

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menempatkan kebutuhan berbagai sektor pembangunannya sebagai keperluan primer atau utama. Hal tersebut wajib diikuti dengan perencanaan pembangunan yang penuh pertimbangan dan berhati-hati, mulai dari sumber daya manusia, demografi sosial, geografis, ekonomi, politik, kesehatan dan lain-lain supaya tujuan pembangunan sampai pada suatu kondisi masyarakat yang lebih baik (Iskandar, 2016:17).

Fakih dalam Munthe dan Hafi (2018:61) menerangkan beberapa isu sosial yang bersumber dari ketidakadilan gender yang lebih sering dialami perempuan adalah marginalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan. Faktor yang mendasari hal tersebut adalah masih adanya masyarakat pedesaan yang menganggap perempuan selalu berada pada tugas dan fungsi di wilayah domestik saja. Hal ini membuat peran perempuan dipersempit sehingga dianggap tidak perlu memiliki pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi diri mereka di luar pekerjaan domestiknya.

Andi Hanindito (2011:11) menerangkan bahwasannya pemberdayaan perempuan adalah kegiatan yang mengupayakan adanya peningkatan kemampuan perempuan untuk memiliki akses serta kendali terhadap sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan. Sejalan dengan itu, Haryanto (2008:9) menegaskan dalam tulisannya bahwa pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk memberdayakan manusia, memampukan manusia, dan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri manusia, baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Penelitian Munte dan Hafi (2018:61) juga menjelaskan bahwa dalam struktur budaya patriarki, peran perempuan lebih didominasi untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh produk politik sosial budaya yang terus berkembang di masyarakat patriarki yang kemudian memunculkan beragam bentuk ketidakadilan yang banyak

dialami oleh perempuan. Sebagaimana yang digambarkan, peradaban manusia yang menormalisasi fenomena ketertindasan perempuan telah tergambar dalam fragmentasi sejarah di berbagai belahan dunia (Nugroho, 2011:41).

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kesetaraan gender adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Instruksi Presiden ini memiliki tujuan untuk menyelenggarakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berfokus pada perspektif gender. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan adanya keadilan dan kesejahteraan gender dalam kehidupan baik berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender juga telah dilaksanakan di sebagian desa/kelurahan dikabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Salah satu kabupaten yang sudah melaksanakan Pengarusutamaan Gender adalah Kabupaten Gresik. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Realisasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik dilakukan dengan memberdayakan perempuan melalui pendidikan penyadaran gender, yakni program Gender Watch bersama KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan) yang menjadi pihak perencana serta pelaksana program. Kerjasama tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Gresik untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan melalui akses keadilan gender. Salah satu bentuk kontribusi Gender Watch adalah terbentuknya Sekolah Perempuan (Dewanti, 2020).

Septiani (2015: 68) dalam penelitiannya menjelaskan, Sekolah Perempuan merupakan pendidikan non formal di kalangan perempuan akar rumput melalui proses pembelajaransepanjang hayat yang dapat menjadikan perempuan lebih mandiri serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Tujuan dari dibentuknya Sekolah Perempuan adalah mengembangkan keterampilan *leadership* pada perempuan sehingga mereka mempunyai kesadaran kritis, solidaritas, kepedulian, kecakapan hidup dan berkomitmen menjadi pelaku perubahan sosial supaya dapat terhindar dari yang namanya kemiskinan. (Misiyah dan Ulfa Kasim, 2017:4).

Pelaksanaan Sekolah Perempuan sudah dilakukan di enam Provinsi Indonesia yaitu di: (1) Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2) Provinsi Nusa Tenggara Timur, (3) Provinsi Jawa Timur, (4) Provinsi Sulawesi Selatan, (5) Provinsi Sumatera Barat, dan (6) Provinsi DKI Jakarta. Di Jawa Timur sendiri, Sekolah Perempuan dilaksanakan di beberapa daerah salah satunya yaitu di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah Kecamatan Wringinanom. Pemilihan Desa Kesamben Kulon di Kecamatan Wringinanom sebagai lokasi pertama dilaksanakannya sekolah perempuan dikarenakan Desa Kesamben Kulon merupakan daerah kantong kemiskinan. Fakta tersebut didukung dengan pernyataan Sulikah Ekayanti, S.Sos selaku Kasi Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, beliau mengatakan bahwa:

”Untuk pemilihan lokasi berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 disana sudah terpilah dari desil 1 sampai 4. Desil satu sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 itu hampir miskin, desil 4 rentan miskin. Daerah Wringinanom merupakan daerah kantong kemiskinan, banyak penduduknya yang berprofesi sebagai buruh tani, buruh pabrik sehingga kemudian mengerucut kesatu desa yaitu Kesamben Kulon”. (wawancara pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 11.00 WIB)

Desa Kesamben Kulon pada tahun 2018 menduduki posisi kedua dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 6.670 jiwa dengan penyebaran penduduk laki-laki sejumlah 3.372 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 3.298 jiwa (*Kecamatan Wringinanom Dalam Angka 2019*). Dari pengamatan peneliti juga ditemukan bahwa sebagian besar wilayah Desa Kesamben Kulon merupakan lahan pertanian sehingga banyak yang bekerja sebagai petani. Masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sebagian besar menjadi buruh tani, dan mayoritas buruh tani berasal dari kalangan perempuan.

Sekolah Perempuan sengaja dibentuk untuk perempuan-perempuan di Desa Kesamben Kulon setelah melihat kondisi sosial-historinya yang sangat terbelakang. Selain itu terdapat juga masalah pendidikan, kesehatan perempuan, pernikahan usia anak dan permasalahan rumah tangga seperti beban kerja perempuan di dalam dan di luar rumah. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Iva selaku Ketua KPS2K yang merupakan fasilitator pemberdayaan di Sekolah Perempuan, sebagai berikut:

“Sekolah perempuan itu sebenarnya pendidikan non formal untuk perempuan miskin. Karena banyak terjadi permasalahan sosial di sana (Kesamben Kulon). Salah satu permasalahan yang terjadi banyaknya pernikahan usia anak,

kalo sudah miskin otomatis dampaknya kemana-mana seperti pendidikan, kesehatan reproduksi perempuan, akses perempuan menjadi terbatas. Dan yang mengalami itu semua mayoritas perempuan”. (wawancara pada 25 Januari 2019 pukul 10.00 WIB)

Pada masa sekarang harusnya pendidikan tidak memandang gender, baik laki-laki ataupun perempuan (Asyiah dkk, 2017:2). Memiliki pendidikan bukan hal yang mudah untuk dicapai bagi seorang perempuan apalagi kaitannya dengan kodrat perempuan yang akan menjadi ibu rumah tangga. Mahalnya biaya pendidikan dan kurangnya akses pendidikan serta persoalan budaya (patriarki) membuat perempuan di Desa Kesamben Kulon yang miskin dan marginal sulit untuk mengenyam pendidikan formal. Data jumlah partisipasi pendidikan perempuan anggota Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Tamatan Sekolah Perempuan
Anggota Sekolah Perempuan di Desa
Kesamben Kulon Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	27
2	Usia Pra-Sekolah	2
3	Tidak tamat SD	37
4	Tamat SD/MI	175
5	Tamat SMP/MTs	139
6	Tamat SMA/MA	25
7	S1	2
8	S2	1
Jumlah Total		408

Sumber: Data KPS2K

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak anggota perempuan yang berasal dari tingkat Pendidikan rendah, sedangkan ada beberapa anggota yang menyanggah gelar S1 bahkan hingga S2, yaitu mereka yang berasal dari keluarga mampu dan merupakan perangkat desa Kesamben Kulon namun bersedia menjadi peserta sekolah perempuan. Rendahnya pendidikan perempuan di Desa Kesamben Kulon itu dikarenakan adanya beberapa faktor. Hasil *Participatory Rural Appraisal* (PRA) Desa Kesamben Kulon tahun 2015 dari hasil wawancara dengan Suhartini menyatakan bahwa budaya patriarki yang masih kental didalam masyarakat desa adalah hambatan yang sulit dilawan, dimana laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan dan adanya pemikiran kuno yang menganggap seorang

perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena mereka pada akhirnya hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Kemudian masalah biaya dimana para orang tua keberatan dengan biaya pendidikan yang tidak gratis yang harus dikeluarkan setiap hari. Selanjutnya adalah masalah akses. Desa Kesamben Kulon berada di wilayah perbatasan dan pinggiran yang jauh dari pusat keramaian, jalan raya, fasilitas umum, serta fasilitas transportasi. Dari ketidakmampuan dalam mendapatkan pendidikan tersebut sehingga marak terjadinya pernikahan usia anak di Desa Kesamben Kulon (Anggraeni, 2017).

Sekolah Perempuan di Kecamatan Wringinanom telah menunjukkan keberhasilannya dan membuahkan penghargaan bagi Kabupaten Gresik yaitu Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya tahun 2016 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan APE yang diberikan dinilai sebagai suatu pengakuan terkait komitmen serta peran pengambil kebijakan utamanya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini sejalan untuk mewujudkan kesetaraan maupun keadilan di bidang gender dengan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Dari keberhasilan Sekolah Perempuan tersebut, menjadikan Wringinanom sebagai pionir dan pemerintah pun mereplikasikan sekolah perempuan di desa-desa lainnya.

Keberhasilan dari adanya Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon tidak serta merta terjadi. Hal tersebut didukung dengan program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin terstruktur dan memiliki target capaian dalam setiap pertemuan sehingga dengan adanya kajian tentang pemberdayaan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan klarifikasi serta kritik terhadap kegiatan yang telah diimplementasikan dan dapat diketahui perubahan yang ditimbulkan dari sebelum adanya sekolah perempuan hingga adanya manfaat dari Sekolah Perempuan yang dirasakan peserta Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon.

Penelitian ini dapat dianalisis menggunakan tahap yang harus dilewati dalam proses belajar pemberdayaan masyarakat menurut Sulistyani (2004:83-84) yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) tahap kesadaran yang meliputi pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli; (2) tahap transformasi kemampuan yang meliputi wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar; dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan-keterampilan yang meliputi terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Berdasarkan kondisi faktual tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang

pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan yang ada di desa Kesamben Kulon dengan memfokuskan kajian penelitian dengan judul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik".

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah diksi berbahasa Inggris "empowerment" yang mana bisa diartikan "pemberkuasaan", artinya pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantage*). Crieg dan Mayo (1995) dalam Huraerah (2011: 96), berpendapat bahwa pemberdayaan termasuk dalam konsep pengembangan masyarakat dan berhubungan dengan konsep-konsep sebagai berikut: (1) kemandirian (*self-help*), (2) partisipasi (*participation*), (3) jaringan kerja (*networking*), dan (4) pemerataan (*equity*). Pemberdayaan masyarakat juga dapat dimaknai sebagai proses pembangunan yang mana inisiatifnya bermula dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosial yang memiliki tujuan memperbaiki kondisi dan situasi diri (Prayitno et al., 2013). Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat ditujukan sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat guna mendapatkan daya dalam proses pengambilan keputusan serta penentuan aksi yang akan dilakukan baik terkait diri sendiri, termasuk dalam mengurangi efek hambatan diri sendiri maupun sosial (Adi, 2012).

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu usaha terencana dan sistematis guna mencapai yang namanya keadilan dan kesetaraan gender baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Pemberdayaan dinilai sebagai satu-satunya pendekatan pembangunan kepada perempuan dengan melihat berbagai aspek kehidupan serta pekerjaan yang dilakukan perempuan, mulai dari pekerjaan yang bersifat produktif, reproduktif, privat, publik sampai menolak upaya apapun yang menilai rendah pekerjaan perempuan serta mempertahankan keluarga dalam sebuah rumah tangga. Pemberdayaan perempuan juga diartikan sebagai usaha meningkatkan kemampuan perempuan dalam mendapatkan akses serta mendapat kendali terkait semua sumber daya dalam dari seluruh aspek kehidupan (Haninditi, 2011). Lebih lanjut, pemberdayaan perempuan dinilai sebagai langkah efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan dan penyakit, serta digunakan sebagai pencapaian pembangunan yang benar-benar berkelanjutan (Harkristuti, 2008).

Indikator yang menyatakan bahwa seorang perempuan telah berdaya antara lain sebagai berikut: (1) mandiri dan kreatif, (2) terampil menciptakan hals yang baru, (3) mampu berpandangan secara realistis, (4) kuat dalam permasalahan dan proporsinya, dan (5) berani melakukan sesuatu dan dapat memegang kebenaran serta berani memberikan kritik. Apabila indikator tersebut terpenuhi, maka perempuan dinilai dapat mandiri sesuai keyakinannya meskipun tanpa bantuan orang lain (Murniarti, 2004).

Pendidikan

Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kegiatan secara sadar serta terencana yang dilakukan guna mewujudkan suasana proses pembelajaran. Hal ini dilakukan supaya pengembangan potensi dalam diri peserta didik dapat tercapai, baik kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan usaha yang dinilai memanusiakan manusia muda. Manusia muda masih dianggap belum menjadi pribadi yang sempurna sehingga masih memerlukan pendidikan sebagai arahan menjadi manusia seutuhnya selama masa tumbuh dan berkembang. Manusia seutuhnya berarti manusia yang mempunyai berbagai potensi seperti potensi panca indera, potensi rasa, potensi berpikir, potensi cipta, potensi karya, serta potensi budi nurani (Driyakarya, 2011). Lebih lanjut, Pendidikan dapat diartikan sebagai bagian dari proses interaksi antar manusia dengan lingkungannya yang berlangsung secara sadar serta terencana. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi manusia, baik dari jasmani maupun rohani yang bisa memunculkan perubahan positif ke arah kemajuan. Perubahan yang dimaksud baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang berlangsung secara terus-menerus guna mencapai tujuan hidupnya (Ahmadi, 2014).

Sekolah Perempuan

Sekolah Perempuan sebagai proses pembelajaran atau pendidikan dibentuk atas cita-cita untuk mengembangkan jiwa pemimpin perempuan. Harapan adanya sekolah ini adalah meningkatkan kesadaran kritis perempuan, meningkatkan solidaritas dan kepedulian perempuan, meningkatkan kehidupan ekonomi perempuan, serta meningkatkan peran partisipasi perempuan untuk turut melakukan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Sekolah Perempuan sendiri termasuk dalam kategori pendidikan non formal yang mempunyai kejelasan tujuan dan diberikan secara sengaja kepada perempuan sasaran. Pendidikan non formal yang

dimaksud memiliki cakupan luas yang terdiri dari segala bentuk pendidikan serta pelatihan baik oleh masyarakat, organisasi maupun keluarga. Keberhasilannya dilihat dari kemampuan menjawab adanya permasalahan serta kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sedang belajar. Masyarakat yang dimaksud antara lain adalah peserta didik maupun organisasi penyelenggara pendidikan luar sekolah (Djafar, 2001).

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Sekolah Perempuan (Sugiyono, 2015). Metode deskriptif sendiri berarti sebuah metode penelitian yang memiliki fokus penelitian pada beberapa hal, misalnya untuk meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu status kelompok manusia, sistem pemikiran, hingga suatu peristiwa yang sedang terjadi pada masa sekarang (Nazir, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: (1) observasi bagaimana kondisilingkungan, perkembangan perilaku *stakeholders*, dan kemajuan pembelajaran para peserta Sekolah Perempuan, (2) dokumentasi program yang dilakukan saat pembelajaran di Sekolah Perempuan sedang berlangsung, serta (3) wawancara mendalam bersama narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*. Wawancara dilakukan bersama pihak LSM KPS2K yang terdiri dari 2 (dua) orang narasumber, pemerintah desa 1 (satu) orang narasumber serta peserta program sekolah perempuan 4 (empat) orang narasumber.

Fokus penelitian menggunakan teori tahap-tahap pemberdayaan masyarakat milik (Sulistiyani, 2004) yang berupa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan. Tahapan tersebut terdiri dari tiga tahap sebagai berikut: (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, yang mantahap pertama untuk menciptakan pra-kondisi dan membentuk perilaku kesadaran serta kepedulian di tengah masyarakat sehingga para perempuan merasa butuh meningkatkan kapasitas dirinya dan memiliki keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan; (2) tahap transformasi kemampuan, yang mana para perempuan menjalani proses belajar mengenai pengetahuan serta keterampilan yang memiliki hubungan dengan tuntutan kebutuhan; dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan, peningkatan kemampuan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan supaya masyarakat dapat membentuk kemampuan mandiri sehingga dapat membentuk inisiatif, melahirkan kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Milles dan Huberman (1992; 19-20) yang terdiri dari empat kegiatan

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sekolah perempuan merupakan pendidikan non-formal bagi perempuan marginal yang memiliki tujuan tercapainya keinginan serta terlaksananya program Gender Watch sebagai upaya peningkatan kapasitas kelompok perempuan desa dalam pembangunan, pendidikan dan program perlindungan sosial pemerintah. Gender Watch merupakan kegiatan pemantauan suatu program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan tiga pemantau dan dilakukan melalui gerakan bersama. Tiga kelompok pemantau tersebut adalah kelompok perempuan miskin sebagai penerima manfaat program, pemerintah, dan masyarakat sipil seperti pers, akademisi, maupun organisasi kemasyarakatan. Salah satu kontribusi adanya Gender Watch di Kabupaten Gresik adalah terbangunnya Sekolah Perempuan di desa-desa yang ada di Kabupaten Gresik. Sekolah Perempuan dibentuk sebagai tempat untuk para perempuan akar rumput yang mana memiliki tujuan untuk melaksanakan pemantauan dari adanya program Jaminan Sosial Pemerintah Gresik. Lebih lanjut, Sekolah Perempuan juga dinilai sebagai suatu alternatif pemberdayaan yang memberi bekal para anggotanya dengan proses pembelajaran yang ada di dalamnya.

Sekolah Perempuan dibentuk sebagai tempat belajar serta mengelola pengetahuan bagi perempuan yang pemberdayaannya dikembangkan pada kelompok-kelompok miskin yang ada di pedesaan, perkotaan, pesisir, maupun kepulauan terpencil. Proses belajar yang berada di dalamnya akan dikaitkan dengan analisis struktur yang lebih luas terhadap berbagai system, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga budaya. Pengalaman perempuan dalam hal ini akan menjadi sumber utama dalam proses pembelajaran serta membangun pengetahuan. Nantinya perempuan di dalam setiap komunitas akan didampingi oleh seorang fasilitator atau edukator yang akan tinggal di lokasi Sekolah Perempuan. Tujuan adanya fasilitator yang tinggal bersama para perempuan di Sekolah Perempuan adalah menumbuhkan rasa empati dan pengetahuan mendalam terkait kondisi lapangan. Lebih lanjut, kehadiran fasilitator juga dapat mengaitkan kehidupan perempuan dengan materi pendidikan serta pengorganisasian perempuan.

Sekolah Perempuan ini sudah tersebar di 14 desa dan 7 kecamatan se-Kabupaten Gresik. Adapun desa yang telah berdiri sekolah perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Desa yang telah berdiri
Sekolah Perempuan

Desa	Kecamatan	Jumlah
1. Kesamben Kulon	Wringinanom	986
2. Mondoluku		
3. Sooko		
4. Sumber Gede		
5. Gunungteguh	Sangkapura	30
6. Wonorejo	Balongpanggang	60
7. Kedungsumber		
8. Dooro	Cerme	60
9. Dungus		
10. Pulopancikan	Gresik	60
11. Kramatinggil		
12. Sidomukti	Bungah	60
13. Kramat		
14. Kepuhlegundi	Tambak	30
Jumlah Keseluruhan		1286

Sumber: Data yang dihimpun peneliti

Dari beberapa desa tersebut, Desa Kesamben Kulon merupakan desa yang pertama kali didirikan dan dilaksanakannya sekolah perempuan di Kabupaten Gresik kemudian disusul desa lainnya.

Sekolah Perempuan ini memiliki prioritas untuk mengembangkan pendidikan perempuan yang berkaitan dengan penguatan perspektif dan keterampilan. Pendidikan yang diberikan meliputi materi terkait gender, kesehatan reproduksi, organisasi, serta usaha ekonomi yang telah dikombinasikan dengan pendidikan keaksaraan. Tujuannya adalah meningkatkan akses para perempuan miskin terhadap layanan penting serta program pemerintah sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta terpenuhinya hak-hak perempuan lebih tepatnya hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses dari pemberdayaan yang harapannya dapat membuat peserta didik yang terlibat menjadi berdaya sebagai manusia yang terdidik, cerdas, serta berilmu dan berpengetahuan. Hal ini diwujudkan secara terpadu sebagai usaha penduduk setempat guna meningkatkan kondisi baik dari segi ekonomi, segi sosial dan segi budaya yang dinilai dapat bermanfaat bagi masyarakat (Tukiman dkk, 2019:40).

Pelaksanaan Sekolah Perempuan yang ada di Desa Kesamben Kulon tidak terikat hari dan waktu karena mayoritas anggotanya merupakan buruh tani dan ibu rumah tangga. Para anggotanya membuat kesepakatan tersendiri mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan. Program kegiatan dalam pembelajaran di Sekolah

Perempuan Desa Kesamben Kulon antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar
2. Kegiatan pertanian berkelanjutan
3. Kegiatan membuat koran GEMA Perempuan Pedesaan
4. Kegiatan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)

Dari kegiatan-kegiatan yang berjalan tersebut, Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon memberikan dampak perubahan bagi para pesertanya. Perubahan-perubahan tersebut dikaji menggunakan teori tahap-tahap pemberdayaan masyarakat oleh Sulistyani (2004:83-84) yang meliputi tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan dan tahap peningkatan kemampuan. Berikut hasil uraian tahap-tahap pemberdayaan tersebut:

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan membentuk perilaku sadar dan peduli masyarakat akan kondisinya saat itu sehingga muncul kesadaran untuk memperbaiki dan membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Penyadaran dalam tahap pemberdayaan mempunyai arti yang sama dengan tahap persiapan yaitu menyiapkan pelaksanaan program sekolah perempuan dengan melakukan survei dan penggalian data di lapangan guna untuk menentukan sasaran program sekolah perempuan yang dilakukan oleh LSM KPS2K. Adapun kriteria sasaran program sekolah perempuan adalah perempuan dalam kondisi ekonomi lemah (miskin) dan berpendidikan rendah. Berdasarkan hasil survey dan pendataan yang dilakukan oleh LSM KPS2K langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada perempuan-perempuan sasaran program. Ibu Iva ketua LSM KPS2K memaparkan sebagai berikut:

“Kami dari tim KPS2K awalnya dulu melakukan sosialisasi sekolah perempuan kepada masyarakat. Tim KPS2K turun langsung ke lapangan guna mencari informasi secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran kita adalah masyarakat yang paling miskin baik itu dari segi pendidikannya, ekonominya, maupun masyarakat yang tidak pernah mengikuti kegiatan publik. Nah, dari situ sudah terdapat beberapa orang, kemudian dari situ mereka kami ajak untuk mengikuti pertemuan di balai desa Kesamben Kulon, karena tujuan dari gender watch ini adalah advokasi berbasis data maupun gender juga, jadi berdasarkan data pilah gender dengan menggunakan analisis gender. Kita

mengadvokasi para penerima manfaat program perlindungan sosial dengan cara meningkatkan kapasitas para perempuan penerima manfaat maupun yang seharusnya menerima bantuan perlindungan sosial dari pemerintah. Cara bagi perempuan untuk memantau program tersebut ialah kita membangun capacity building didalam kelompok perempuan miskin. Caranya dengan pertama kali menyadarkan kelompok perempuan untuk menyadari hak-haknya, kemudian kita terapkan pelatihan-pelatihan kepada kelompok perempuan miskin tersebut. Karena dengan menyadari mereka memiliki hak-hak tersebut maka, mereka sendiri dapat memantau dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya sendiri” (wawancara pada tanggal 11 januari pukul 10.00 wib)

Sosialisasi merupakan langkah awal penyadaran yang dilakukan LSM KPS2K dengan memberikan informasi dan pemahaman kepada perempuan terkait program sekolah perempuan, selain itu sosialisasi diberikan dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada perempuan akan kondisi yang dialaminya selama ini sehinggaterbuka pikiran dan muncul kesadaran perempuan akan pentingnya meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti program sekolah perempuan.

Dalam kegiatan pembelajaran pada kegiatan sekolah perempuan dengan tahap awal melakukan perkenalan dan penggalian data perempuan. Perkenalan dan penggalian data merupakan upaya menciptakan kondisi agar perempuan nyaman dan terbuka sehingga dapat menceritakan masalah dan kondisi yang dialaminya, karena selama ini perempuan Desa Kesamben Kulon tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami ketidakadilan dan ketertindasan. Hasil dari pembelajaran tahap awal tersebut diketahui bahwa banyaknya perempuan mengalami putus sekolah, pernikahan anak, tidak pernah berpartisipasi di ruang publik, serta mengalami beban ganda. Dari hasil tersebut kemudian dipetakan secara partisipatif.

Gambar 1
Kegiatan Pemetaan Partisipatif



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada tahap pemetaan partisipatif ini perempuan diminta untuk menuliskan identitas diri, pendapatan dan permasalahan yang dialaminya pada suatu kertas plano yang telah disediakan oleh fasilitator seperti permasalahan putus sekolah, pernikahan anak, kemiskinan, kesehatan masyarakat desa dan lainnya. Selanjutnya tulisan tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis bersama-sama. Hal tersebut didukung oleh gambar 1 yang menunjukkan proses pemetaan partisipatif oleh perempuan untuk memudahkan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari para perempuan ini dengan didampingi oleh tim pemantau komunitas dari KPS2K, hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Suyati sekolah perempuan sebagai berikut:

“pertamakali pertemuan itu saya diminta untuk melakukan perekaman, lalu menggambar wajah sendiri-sendir. Setelah menggambar wajah, saya ditanyai umur berapa dan usia menikah waktu itu umur berapa. Kemudian ditanyai lulusan apa pendidikannya, serta ditanyai pekerjaan sehari-harinya apa. Saya juga diminta untuk menceritakan pengalaman hidup saya dan sebelum pertemuan berakhir kami membuat perjanjian belajar dilakukan dimana dan kapan waktunya”. (Wawancara pada tanggal 5 januari 2019, pukul 09.00 WIB)

Ditinjau berdasarkan tahap pemberdayaan menurut Sulistyani (2004:83-84), tahap penyadaran dilakukan guna membentuk perilaku untuk sadar peduli sehingga dapat memunculkan rasa untuk terus melengkapi kebutuhan peningkatan kapasitas diri. Pada persiapan awal sudah dilakukan dengan baik oleh pihak LSM KPS2K dengan melakukan survey dan pendataan secara langsung dalam menentukan sasaran program sekolah perempuan, melakukan sosialisasi, menciptakan prakondisi yang mampu membuka pikiran dan kesadaran perempuan, ketersediaan fasilitas juga sudah diberikan, serta didukung dengan kesiapan pihak LSM KPS2K dalam melakukan proses pemberdayaan.

Ibu-ibu yang hadir dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh LSM KPS2K menjadi paham bahwa selama ini mengalami ketertindasan dan ketidakadilan yang menurut mereka dan keluarganya merupakan suatu nilai yang dianut dan tidak boleh dibantah, padahal mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan atas diri mereka sendiri. Sayangnya, ditemukan bahwa dalam proses sosialisasi banyak perempuan yang tidak hadir, dan hanya beberapa perempuan saja yang hadir dalam pertemuan yang diadakan di Balai Desa Kesamben Kulon tersebut sehingga pada awal-awal pelaksanaan program sekolah perempuan tidak banyak perempuan yang

tergerak untuk mengikuti sekolah perempuan. Hal tersebut dikarenakan adanya larangan dari pihak keluarga yang menganggap bahwa Sekolah Perempuan hanya membuang waktu serta tidak ada manfaatnya. Ivani anggota sekolah perempuan memaparkan sebagai berikut:

“awalnya masyarakat sini tidak suka mbak, banyak sekali penolakan waktu saya *door to door* mengajak ibu-ibu disini untuk ikut sekolah perempuan mereka menolak bahkan saya juga sempat diusir belum lagi omongan orang-orang yang bilang kalau sekolah perempuan itu mengajarkan perempuan atau istri-istri berani kepada suami tapi alhamdulillah mbak sekarang masyarakat sini mulai sadar dan mereka justru berterimakasih pada kami sekolah perempuan karena banyak membantu masyarakat dan membuat banyak perubahan” (Wawancara pada tanggal 5 januari 2019, pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan adanya kendala yang dialami dalam proses pemberdayaan hal ini dikarenakan adanya penolakan dan minimnya dukungan dari masyarakat pada saat itu, namun pihak pemberdaya KPS2K dengan konsisten masih melakukan sosialisidan memberikan pemahaman kepadaperempuan untuk mengikuti program sekolah perempuan dan anggota sekolah perempuan yang telah bergabung juga terus melakukan pendekatan kepada perempuan yang lainnya tanpa melakukan pemaksaan. Hal ini menjadi langkah awal dalam menyadarkan perempuan agar terbuka pikiran dan meningkatkan kapasitas diri.

2. Tahap Transformasi Kemampuan

Transformasi kemampuan memiliki arti bahwa masyarakat akan menjalani proses pembelajaran mengenai pengetahuan hingga kecakapan keterampilan yang dirasa relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini, perempuan bisa turut berperan dari tingkat rendah seperti sekadar menjadi pengikut atau sebagai objek pembangunan saja karena belum mampu menjadi subjek pembangunan.

Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sekolah perempuan dilakukan dengan menerapkan Pendidikan Adil Gender sebagai acuan dalam proses belajar mengajar. Dalam Pendidikan Adil Gender tersebut terdapat tiga elemen penting yaitu: (1) dimulai dengan proses penyadaran kritis; dalam hal ini LSM KPS2K sebagai pihak pemberdaya memberikan pendidikan yang mencakup materi gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi; (2) pengorganisasi dan pengembangan

kepemimpinan. Dibutuhkan suatu perjuangan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan maupun ketertindasan perempuan. Hal ini tidak bisa tercapai apabila perempuan tidak memiliki kemampuan organisir diri maupun kemampuan mengembangkan kepemimpinan di kalangan mereka sendiri; dan (3) peningkatan keahlian hidup, akibat adanya budaya patriarki telah mendorong sebagian perempuan untuk tetap diam menerima kondisinya sehingga mereka minim keterampilan dan rentan mengalami kemiskinan. Oleh sebab itu, perempuan membutuhkan proses yang membantu kalangan mereka untuk meningkatkan keterampilan hidupnya serta mampu berjuang mensejahterakan dirinya sendiri.

Kegiatan belajar di sekolah perempuan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif, yaitu pembelajaran yang prosesnya dilakukan secara dua arah, dialogis, terbuka serta saling menguatkan. Metode partisipatif dipilih karena pengalaman hidup perempuan akan digali dari setiap anggotanya sehingga memudahkan dan menciptakan rasa nyaman bagi perempuan untuk mengikuti kegiatan belajar. Ketika membicarakan masalah perempuan, hal sensitif seperti masalah reproduksi dan permasalahan dalam keluarga sering dianggap tabu untuk dibicarakan di depan umum sehingga diperlukan beberapa metode untuk mengubah pola pikir perempuan supaya mau mengungkapkan permasalahannya kepada sesama perempuan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran reguler sekolah perempuan antara lain silsilah keluarga, menggambar, analisis film, bermain perandiskusi kelompok, meraba tubuh, diorama serta tutorial untuk keaksaraan fungsional yang dilakukan di Balai Desa atau Balai Dusun terlihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kegiatan Pembelajaran Reguler
Sekolah Perempuan Desa Kesamben
Kulon



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti proses pembelajaran sekolah perempuan dilakukan di tempat terbuka dimana tempat tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang sebelumnya dilakukan ,

terlihat kumpulan ibu-ibu yang sedang duduk melingkar seperti sedang musyawarah mendengarkan materi yang disampaikan oleh fasilitator.

Sekolah Perempuan merupakan suatu alternatif pendidikan non formal yang ditujukan kepada perempuan miskin dengan tujuan menyadarkan pentingnya hak-hak perempuan dan mendapatkannya. Di sana, perempuan tidak hanya belajar membaca dan menulis, melainkan juga dibekali materi tentang kepemimpinan perempuan hingga permasalahan perlindungan sosial. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Ibu Lilik:

“proses pembelajaran pertama kali yaitu datang ke tempat sekolah perempuan, kemudian absen, duduk melingkar, setelah itu fasilitator menerangkan materi, lalu kami mendengarkan, setelah penjelasan dari fasilitator kami diajak untuk berdiskusi materi yang telah disampaikan. Materi yang sering disampaikan adalah penjelasan tentang perlindungan sosial kesehatan, seperti JKN KIS PBI, materi perlindungan anak, perkawinan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pendidikan adil gender, kesetaraan gender, serta kepemimpinan perempuan”.

Ditinjau dari tahap pemberdayaan menurut Sulistyani (2004: 83-84), tahap peningkatan kemampuan tersebut sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari hasil wawancara serta observasi peneliti dimana perempuan yang telah mengikuti proses belajar, secara pengetahuan dan kecakapan mereka banyak mengalami peningkatan. peningkatan kemampuan tersebut dilihat dari perempuan yang sudah mampu menerapkan pengetahuan dan ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah perempuan. Hasil dari pembelajaran terkait gender menjadikan perempuan mampu memahami peran dan haknya baik dalam keluarga dan lingkungannya. Perempuan telah mampu bernegosiasi dengan suami dan berdiskusi mengenai pembagian tugas rumah tangga yang sebelumnya perempuan tidak pernah memperlakukan masalah tersebut meskipun selama ini perempuan mengeluhkan akan beban pekerjaan rumah tangga yang dilakukan sendiri. Hal tersebut didukung dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Ivani, anggota sekolah perempuan sebagai berikut:

“kami belajar seks dan gender mbak. jadi kalau seks itu ya jenis kelamin, jadi yang membedakan laki-laki dan perempuan itu jenis kelamin ya itu disebut seks. Kalau gender itu semacam apa ya, kaya semacam sifat dan peran yang membedakan laki-laki dan perempuan gitu loh mbak kalau

dijelaskan susah mbak ya gampangannya kalau cowok gak boleh nyapu tapi kan sebenarnya gapapa kan boleh-boleh saja lah itu kan juga salah satu bentuk ketidakadilan, yang bilang gak boleh nyapu itu kan orang-orang jaman dulu sedangkan orang dulu kan sangat kuat dengan budaya patriarkinya kalau laki-laki itu yang harus diagung-agungkan. Nah, dari situ mbak yang tidak kami sadari para perempuan seperti kami ini. Selama ini kami tidak mengerti yang kami tau ya perempuan itu dirumah aja, masak, nyuci, nyapu semua pekerjaan rumah dikerjakan perempuan laki-laki ya kerja pulang kerja lagi sudah jadi laki-laki gak mau tau urusan rumah mbak kan jadinya kita yang cepek sendiri lama-lama".(wawancara pada tanggal 18 November 2019, pukul 09.30 wib)

Sebagaimana menurut Nur (2014:21), terlindunginya hak reproduksi perempuan akan membuat perempuan memiliki otonomi serta pilihannya sendiri mengenai fungsi dan proses reproduksinya. Perempuan memiliki keleluasaan untuk memutuskan secara bertanggung jawab apakah mereka menginginkan anak atau tidak, jumlahnya berapa, waktunya kapan, dan sebagainya. Menurut data yang diperoleh melalui PRA Desa Kesamben Kulon tahun 2015 banyak perempuan di Desa Kesamben Kulon yang mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti keputihan dan kista namun perempuan Desa Kesamben Kulon tidak tahu dan tidak sadar akan bahaya penyakit tersebut karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, hal tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Lilik ketua Sekolah Perempuan sebagai berikut:

"Kebanyakan ibu-ibu disini kurang memahami pentingnya kesehatan reproduksi jadi hampir rata-rata peserta sekolah perempuan mengalami seperti keputihan karena selama ini dianggap kondisi yang wajar untuk perempuan jadi tidak pernah ada kepikiran bahayanya dari keputihan. Padahal kan keputihan itu salah satu indikasi adanya gangguan kesehatan alat reproduksi".

Selama 5 tahun ini, kesadaran perempuan akan kesehatan reproduksi juga sudah mulai meningkat, secara rutin perempuan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi di puskesmas desa. Pada awal proses belajar mengenai kesehatan reproduksi, para perempuan diajak untuk mengenali tubuh, mengidentifikasi masalah-masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta

membahas masalah-masalah kesehatan reproduksi melalui metode merabah tubuh. Selain memberikan materi, juga diberikansosialisasi dan pemeriksaan IVA secara gratis bagi perempuan anggota sekolah perempuan yang dilakukan oleh puskesmas Desa Kesamben Kulon yang bekerjasama dengan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik.

Program pertanian berkelanjutan dilakukan dengan memberikan pelatihan menanam sayuran organik. Perempuan di Kesamben Kulon diajari mulai dari menyiapkan tanah sebagai media yang akan digunakan untuk menanam sayuran organik, pemilihan benih, pemberian pupuk, penyiraman dan perawatan sayuran organik. Pertanian organik juga sebagai upaya penyadaran kepada perempuan Desa Kesamben Kulon terkait lingkungan yang sehat dan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian organik. Hasil pertanian organik diharap mampu mendorong perekonomian perempuan secara mandiri sehingga mampu mencapai kesejahteraannya.

Pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kecakapan hidup perempuan melalui pertanian berkelanjutan juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa anggota Sekolah Perempuan telah berhasil mengembangkan budidaya sayuran organik dengan membangun *green house*. Perempuan secara bersama-sama melakukan kegiatan bertani di *green house*, kegiatan yang dilakukan adalah menanam, merawat, memupuk dan memanen hasil pertanian. Tidak hanya itu kegiatan pertanian organik selain bisa dilakukan secara berkelompok juga bisa dilakukan secara individu dengan memanfaatkan pekarangan rumah seperti yang terlihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2
Pertanian Organik



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Para perempuan bisa melakukan pertanian organik dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana saja mulai dari polybag sebagai tempat menanam, kemudian memanfaatkan pupuk organik dari sampah domestik yang diolah di sentra pupuk milik sekolah perempuan Desa Kesamben Kulon sendiri. Kemudian hasil panen dari

pertanian organik yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara individu ini biasanya akan dijual ketika anggota sekolah perempuan mendatangi undangan berbagai acara di kantor pemerintah dan/atau bisa untuk dimasak sendiri untuk dikonsumsi keluarga sendiri.

3. Tahap Peningkatan Kemampuan

Tahap Peningkatan Kemampuan merupakan tahap pengayaan atau tahap dimana terjadinya peningkatan kemampuan intelektual maupun kecakapan keterampilan yang dibutuhkan perempuan. Hal ini diperlukan untuk membangun kemandirian perempuan. Kemandirian yang dimaksud dapat ditandai dari kemampuan perempuan dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi serta melakukan inovasi di lingkungan sekitarnya. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan LSM KPS2K dalam meningkatkan kemampuan perempuan yaitu dengan kegiatan pemantauan program jaminan sosial JKN BI. Pemantauan program perlindungan sosial JKN-BI sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program Gender Watch melalui sekolah perempuan sehingga diperlukan peningkatan kepemimpinan dan kapasitas pada diri perempuan agar tujuan dari pembangunan responsif gender dapat tercapai. Peningkatan kemampuan dilakukan mulai dari pembentukan tim komunitas pemantau. Tim pemantau komunitas dipilih berdasarkan kemampuan anggota sekolah perempuan dalam penguasaan materi dan pemahaman terkait permasalahan program perlindungan sosial JKN-BI yang terjadi di Desa Kesamben Kulon. Perempuan yang terbentuk dalam tim pemantau komunitas selanjutnya diberikan materi dan pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan dan perlindungan sosial.

Peningkatan kemampuan lainnya juga diberikan berupa pendampingan dalam forum pengambilan keputusan yaitu Musrenbang perempuan tingkat desa sampai kabupaten. Menurut Silalahi dan Ratmawati (2016:164), Musrena atau Musyawarah Rencana Aksi Perempuan adalah wadah yang dihadirkan untuk perempuan guna memperluas peran partisipasi perempuan dalam proses perencanaan suatu pembangunan dan sebagai mekanisme percepatan terealisasinya pengarusutamaan Gender (PUG) di segala sektor pembangunan nasional.

Setelah melalui proses belajar perempuan mulai sadar akan posisinya selama ini yang mengalami ketertindasan, ketidakadilan, dan ternomorduakan di ruang publik sehingga perempuan berusaha memperjuangkan hak-haknya terkait dengan pembangunan yang selama ini belum terpenuhi dengan baik. Peningkatan kemampuan dalam pendampingan Musrenbang dilakukan dengan melakukan diskusi-diskusi, dan pengarahan terkait berbagai permasalahan

yang terjadi pada diri perempuan itu sendiri maupun yang terjadi di Desa Kesamben Kulon selanjutnya hasil diskusi tersebut akan menjadi usulan yang akan diikutkan pada Musrenbang perempuan yang diadakan baik oleh pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten seperti yang digambarkan oleh gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1
Musrenbang Desa Kesamben Kulon
Tahun 2016



Sumber: Dokumentasi KPS2K

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang pertama kali dilakukan di Desa Kesamben Kulon pada tanggal 14 Januari 2016. Kegiatan tersebut dihadiri oleh peserta yang terdiri dari masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, pihak kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, hingga pihak Sekolah Perempuan.

Adanya kegiatan musrenbang membuat kelompok perempuan merasa kehadirannya diakui. Selain itu, mereka juga diberikan peluang untuk turutserta berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kelompok perempuan sudah dapat menyampaikan usulan yang berperspektif gender berdasar permasalahan yang dialaminya dan lingkungan sekitarnya dikarenakan selama ini musrenbang desa lebih banyak hanya berisikan usulan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, gedung sekolah, masjid, irigasi, dan drainase. Adapun usulan dari kelompok sekolah perempuan antara lain seperti yang dipaparkan oleh Ibu Ivani, sebagai berikut:

“Sekolah perempuan sudah punya usulan yang telah diketahui oleh pemerintah kabupaten, tetapi usulan tersebut harus melalui musrenbang desa agar dapat direalisasikan. Usulan yang akan disampaikan sekolah perempuan adalah harus berperspektif gender antara lain, penyediaan anggaran dana transportasi bagi warga miskin yang dirujuk ke rumah sakit, pengadaan kejar paket gratis, pengadaan transportasi untuk anak sekolah, pengadaan perpustakaan desa, usulan terkait masalah yang pernah dihadapi yaitu terkait pernikahan anak usia dini. Kemudian membuka

lapangan kerja bagi perempuan dan hasil pertanian. Selanjutnya usulan pengembangan koran dan radio komunitas GPP sebagai media informasi dan komunikasi sederhana di desa dan juga usulan pengembangan pemberdayaan perempuan dengan mengadakan pelatihan tata boga, tata busana, dan koperasi untuk perempuan miskin sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan kelompok perempuan di sekolah perempuan memperlihatkan kemampuan intelektual, kepemimpinan dan kapasitas yang dimiliki perempuan semakin meningkat. Kelompok perempuan telah mampu ikut berperan aktif dalam pembangunan desa melalui usulan-usulan yang disuarakan di kegiatan musrenbang desa.

Peningkatan kecakapan keterampilan perempuan dalam membaca dan menulis juga ditingkatkan melalui pembuat koran Gema Perempuan Pedesaan. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2
Koran Gema Perempuan Pedesaan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Peningkatan kemampuan dari segi keterampilan membaca dan menulis anggota sekolah perempuan juga sudah dilakukan dengan baik dimana perempuan menjadikan koran sebagai media untuk menuliskan pengalaman hidup dan berbagi pengalaman selama ikut kegiatan sekolah perempuan. Selain itu, anggota perempuan juga bisa menuliskan karya-karya lainnya seperti menggambar, berbagi resep makanan dan menulis puisi. Keterampilan menulis mampu meningkatkan kepercayaan diri perempuan karena dengan menulis perempuan dapat menuangkan segala bentuk aspirasinya kepada masyarakat luas. Hasil dari tulisan para perempuan di Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon ditorehkan dalam bentuk koran yang selalu dibawa dalam acara diskusi, baik dalam pertemuan tingkat daerah hingga nasional. Hal ini membuat tulisan perempuan memotivasi dan menginspirasi perempuan lainnya. Koran Gema Pedesaan telah menjadi suatu media informasi

mengenai perempuan desa. Selain itu, koran tersebut juga dinilai sebagai wadah penyaluran aspirasi perempuan di Desa Kesamben Kulon. Setiap anggota sekolah perempuan dilibatkan dalam penulisan isi koran baik sebagai informan dalam artikel maupun pengelola koran.

Ditinjau dari tahap pemberdayaan menurut Sulistyani (2004: 83-84), peningkatan kemampuan perempuan telah dilakukan dengan baik, hal tersebut dilihat dari kemampuan tim pemantau komunitas dalam melakukan pemantauan terhadap program perlindungan sosial yang dilakukan di Desa Kesamben Kulon terhadap keluarga penerima JKN BI dengan memfokuskan pada program KIS. Tim pemantau komunitas telah melakukan pendataan dan wawancara terhadap informan yang terdiri dari 100 Kepala Keluarga laki-laki dan 100 Kepala Keluarga perempuan di Desa Kesamben Kulon. Pendataan tersebut dilakukan dikarenakan ada penemuan data yang diperoleh melalui PRA Desa Kesamben Kulon tahun 2015, tepatnya distribusi program perlindungan sosial bagi perempuan miskin, yaitu terdapat sekitar 257 perempuan miskin yang masih belum menerima jaminan kesehatan.

Pendataan dan wawancara yang dilakukan tim pemantau komunitas pada akhirnya menghasilkan data dan fakta yang menunjukkan mana masyarakat miskin dan mampu. Hal ini membuat layanan kesehatan gratis sebagai bentuk pembagian hak berupa perlindungan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran. Selain itu, baik tim pemantau komunitas maupun anggota sekolah perempuan lainnya saat ini telah mampu mengurus jaminan kesehatan dan perbaikan data, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun tetangga yang termasuk dalam masyarakat miskin dan tidak menerima jaminan kesehatan. Kemampuan perempuan dalam melakukan pemantauan terhadap program jaminan sosial telah menunjukkan kemandirian perempuan dan turut membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ketidaktepatan sasaran bantuan perlindungan sosial pemerintah selama ini terjadi di Desa Kesamben Kulon.

Gambar 3.3
Kegiatan Perbaikan Data Peserta JKNBI di Desa Kesamben Kulon dengan Mobile Customer Service dari BPJS Kesehatan



Pada gambar 3.3 menunjukkan bahwa sekolah perempuan dapat menjembatani para perempuan untuk mengakses fasilitas publik khususnya *Mobile Customer Service* yang gunanya ialah memperbaiki identitas para penerima JKN BI di Desa Kesamben Kulon. Kegiatan perbaikan data JKNPBI juga memberikan dampak positif bagi kelompok perempuan di sekolah perempuan itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Ibu Iswaningsih sebagai berikut:

“dampak positif yang saya rasakan adalah dulu saya tidak dianggap, saya bukan siapa-siapa, tapi sekarang jadi banyak yang minta tolong saya untuk mengurus surat-surat penting seperti akte kelahiran, KK, BJPS maupun yang lain. Selain itu banyak sekali pengalaman yang saya miliki”.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak dampak positif yang didapatkan dari sekolah perempuan. Pada tahap ini perempuan dapat mengadvokasi data dan kapasitas kepemimpinan perempuan dengan inisiatif perempuan untuk membantu sesama masyarakat dalam mengurus surat-surat penting serta membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan perlindungan sosial dari pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pemberdayaan Perempuan melalui Program Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom, maka disimpulkan sebagai berikut: Tahap penyadaran, tahap penyadaran dalam pemberdayaan perempuan melalui program sekolah perempuan sudah dilakukan dengan persiapan yang baik yaitu dengan melakukan pendataan secara langsung terhadap sasaran pemberdayaan. Selain itu penyadaran juga dilakukan melalui sosialisasi, menciptakan prakondisi yang mampu membuka pikiran dan kesadaran perempuan, ketersediaan fasilitas juga sudah diberikan, serta didukung dengan kesiapan pihak LSM KPS2K dalam melakukan proses pemberdayaan. Namun dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditemukan bahwa dalam proses sosialisasi banyak perempuan yang tidak hadir dan pada awal-awal pelaksanaan program sekolah perempuan tidak banyak perempuan yang tergerak untuk mengikuti sekolah perempuan.

Tahap Transformasi kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan telah diberikan oleh pihak KPS2K sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan perempuan. Pada tahap ini perempuan menjalani proses belajar dengan materi belajar yang ada didalam modul adil gender yaitu materi terkait gender, kesehatan

reproduksi perempuan dan kepemimpinan perempuan serta peningkatan keahlian hidup. Tahap Peningkatan Kemampuan, tahap ini dimaksudkan untuk memandirikan perempuan. Peningkatan kemampuan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dengan meningkatnya kepemimpinan dan kapasitas diri perempuan dalam melakukan pemantauan terhadap program perlindungan sosial JKN BI, keterlibatan perempuan dalam forum Musrenbang sebagai advokasi perempuan dalam pembangunan desa serta peningkatan keterampilan perempuan dalam menulis di koran Gema Perempuan Pedesaan.

Saran

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, peneliti mempunyai saran yang sekiranya dapat digunakan untuk melakukan pengembangan pemberdayaan perempuan melalui program sekolah perempuan di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan semangat perempuan.
2. Mengembangkan hasil dari kegiatan pertanian organik sebagai produk lokal Desa Kesamben Kulon yang memiliki daya saing dengan produk yang beredar di pasaran.
3. Melakukan workshop penguatan karakter perempuan di ranah publik.

Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, penulis banyak mendapat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISIP UNESA
2. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing yang membantu membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis oleh peneliti.
3. Ibu Indah Prabawati S.Sos., M.Si dan Ibu Dr. Weni Rosdiana S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji
4. LSM KPS2K Jawa Timur dan Sekolah Perempuan Desa Kesamben Kulon yang membantu dalam proses penelitian
5. Dan Pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan artikel ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Peppy Forestry. 2017. *Penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) dalam Meningkatkan*

Kemandirian Ibu Muda di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. J+PlusUNESA, 6 (2), 1-14.

- Asyiah, Adnan, & Mubarak. 2017. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman.* JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2(1), 1-9.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kajian Awal Indeks Ketipangan Gender 2016.* Diunduh pada tanggal 14 Mei 2019 06:01:18
- Dewanti, Niken Ayu. 2020. *Dampak Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Gresik (Studi pada Sekolah Perempuan Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom).* PUBLIKA, 8(5).
- Hanindito, Andi. 2011. *Berdaya Bersama Perempuan Indonesia.* Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- Iskandar, Dina Trisiana. 2016. *Evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo.* JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 17-22.
- Kristiyanti, Dita. 2019. *Pemberdayaan Perempuan Desa Melalui Sekolah Perempuan di Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.* digilib.uinssby.ac.id, 59-67
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016.* Diunduh pada tanggal 14 Mei 2020 06:16:32
- Marhaeni, Hadriani M & Bisru Hafi. 2018. *Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat untuk Mendukung Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa.* *Journal of Education, Humaniora and Social sciences (JEHSS).* Vol. 1(2): hal. 60-65. Universitas Sumatera Utara
- Misiyah & Ulfa Kalsum. 2017. *Sekolah Perempuan: Mengembangkan Kesadaran Kritis, Kepemimpinan Perempuan Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender.* Jakarta:
- Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- Septiani, Mita. 2015. *Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat.* *Jurnal Ilmiah VISI PPTK PAUDNI.* Vol. 10(2): hal. 67-76.
- Silalahi, Orbalin & Ratnawati. 2016. *Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender Di Kota Banda Aceh.* PALASTREN. Vol. 9(1): hal. 161-188.
- Sofiani, Triana. 2013. *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan.* MUWAZAH: *Jurnal Kajian Gender.* Vol. 1(1): hal. 63-72.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Jogjakarta: Gava Media.
- Tahir, Ratnawati. 2011. *Pendidikan alternatif Untuk Perempuan Marginal Di Pedesaan.* *Jurnal Ilmu Pendidikan.* Vol. 17(4): hal. 313-321.
- Tukimandkk. 2018. *Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.* *Journals of Public Sector Innovatoins (JPSI).* Vol. 2(2): hal. 51-55.
- Tukiman, dkk. 2019. *Pemberdayaan Wanita Kelompok Tani Dalam Usaha Pembuatan Abon Dengan Bahan Dasar Dari Jantung Pisang Di Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.* *Journals of Public Sector Innovatoins (JPSI).* Vol. 4(1): hal. 38-45.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.